



**LAPORAN KEGIATAN MONITORING HASIL SURVEI IPK-IKM
TRIWULAN III TAHUN 2021
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang pelaksanaan survey IPK-IKM dan memastikan tujuan pelaksanaan survey sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan kegiatan monitoring hasil survey IPK-IKM. Monitoring ini telah dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM setiap triwulan sepanjang tahun 2020. Di tahun 2021 ini, monitoring hasil survey tetap dilakukan meskipun dengan sedikit perubahan, dimana monitoring yang dilakukan Balitbang Hukum dan HAM bukan lagi memonitor satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi melakukan monitor terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan Unit Utama.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan yang dilakukan Kantor Wilayah untuk mengevaluasi implementasi rekomendasi/model intervensi laporan monitoring hasil survei IKM-IPK Tahun 2021 pada Unit Pelaksana Teknis yang telah ditentukan.

3. Ruang Lingkup

Subjek dari kegiatan monitoring ini adalah seluruh Unit Pelaksana Teknis yang ada di Wilayah Provinsi dan Objek adalah seluruh unsur yang ada didalam survei IKM-IPK Tahun 2021.

4. Dasar

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

B. Hasil yang dicapai

Tabel 1. Hasil Monitoring Triwulan III Tahun 2021

No.	SATUAN KERJA	BULAN JULI			BULAN AGUSTUS			BULAN SEPTEMBER			KETERANGAN
		IKM	IPK	INTEGRITAS	IKM	IPK	INTEGRITAS	IKM	IPK	INTEGRITAS	
1	Kantor Wilayah	18.58	14.28	94.13	19.05	14.66	97.14	19.2	14.54	98.96	WBBM
2	Kantor Imigrasi	19.67	14.75	97.34	18.82	14.67	99.09	19.53	14.78	98.71	WBBM
3	Lapas Yogyakarta	19.47	14.71	94.75	19.64	14.80	97.94	19.54	14.76	99.53	WBK
4	Lapas Narkotika Yogyakarta	19.34	14.44	98.12	19.66	14.86	99.20	19.83	14.85	99.57	WBK
5	Lapas Sleman	19.85	14.92	99.83	19.79	14.72	99.86	19.77	14.76	99.19	WBK
6	LPKA Yogyakarta	19.50	14.73	97.48	18.77	14.19	96.92	19.1	14.5	97.26	WBBM
7	LPP Yogyakarta	19.48	14.71	94.75	19.19	14.56	94.76	19.54	14.79	97.82	WBK
8	Rutan Yogyakarta	18.59	14.24	94.81	19.11	14.34	95.73	19.57	14.63	98.33	WBBM
9	Rutan Bantul	19.98	14.96	97.18	19.73	15	96.92	19.87	14.92	97.77	WBBM
10	Rutan Wates	19.78	14.84	99.26	19.56	14.73	99.98	19.76	14.79	99.84	WBK
11	Rutan Wonosari	19.91	14.90	99.60	19.89	14.90	99.66	19.71	14.83	99.99	WBBM
12	Bapas Yogyakarta	19.82	14.95	97.14	19.60	14.69	98.44	19.86	14.95	99.64	WBK
13	Bapas Wonosari	19.44	14.51	100	19.59	14.66	99.19	19.66	14.86	99.49	WBK
14	Rupbasan Yogyakarta	19.99	15	99.98	20	14.99	99.74	20	15	99.95	WBK
15	Rupbasan Bantul	19.61	14.83	98.95	19.66	14.89	98.87	19.8	14.8	98.92	WBK
16	Rupbasan Wates	19.95	14.96	98.99	20	15	99.60	20	15	100	WBBM
17	Rupbasan Wonosari	19.72	14.71	99.86	19.38	14.51	99.82	19.49	14.65	100	WBK
	RATA-RATA	19.56	14.73	98.00	19.49	14.71	98.40	19.59	14.74	98.50	

Catatan: Nilai Maksimal Unsur IKM 20 dan Nilai Unsur IPK 15

Tabel 1 menggambarkan IKM dan IPK dari masing-masing Satuan Kerja, dengan skor pada masing-masing unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Perilaku Anti Korupsi (IPK) periode Tahun 2021 (terlampir). Berdasarkan data tersebut. Terdapat 3 (tiga) Satuan Kerja dengan nilai terendah (nilai gabungan IKM, IPK dan Integritas) pada Triwulan III 2021 yaitu:

1. Rutan Yogyakarta;
2. LPP Yogyakarta;
3. Kantor Wilayah.

Yogyakarta, 30 September 2021
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia



Priyanto, SH., MH.

NIP. 196612011988031001